


PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KEUANGAN

Semester I

Periode Tahun 2022

Kode Satker 401909



Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat No. S-29/PB/PB.6/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 22 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ENDANG ERENDI, S.E., M.M.
NIP.19840913 200904 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	15
A.6. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2. Belanja	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	26
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	27
C.6. Ekuitas	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	28
D.2. Beban Pegawai	28
D.3. Beban Persediaan	28

D.4.	Beban Barang dan Jasa	28
D.5.	Beban Pemeliharaan	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	29
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	29
D.8.	Beban Bantuan Sosial	29
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	29
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	30
D.11.	Beban Lain-lain	30
D.12.	Kegiatan Non Operasional	30
D.13.	Pos Luar Biasa	30
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
E.1.	Ekuitas Awal	30
E.2.	Surplus (defisit) LO	31
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	31
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	31
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	31
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	31
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	31
E.3. 6	Ekuitas Akhir	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	32
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	32
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	32

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 2021	2
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2022	23
Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2022 dan 2021	23
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022	24
Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022	24

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jalan HS. Ayik Aqil Km.16, Sukajadi - Banyuasin, Sumatera Selatan

Telp/fax : (0711)-5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 22 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,

SA Sekretaris,



ENDANG CHENDI, S.E., M.M.

NIP.198409132009041002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp4.986.169.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terealisasi untuk semester I sebesar Rp2.251.609.482,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Nilai Aset Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2022 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kewajiban sebesar Rp508.688.756- (lima ratus delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Ekuitas sebesar Rp26.502.643.034,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah).

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2022	2021	Rp	%
Aset Lancar				
Kas di bendahara pengeluaran	39.600.000	0	39.600.000	100
Persediaan	0	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	39.600.000	0	39.600.000	100
Kewajiban				
Utang Pada Pihak Ketiga I	469.088.756	40.388.797	428.699.959	1061
Uang Muka KPPN	39.600.000	0	39.600.000	100
Jumlah Kewajiban	508.688.756	40.388.797	468.299.959	1159
Ekuitas	26.502.643.034	27.156.365.131	(653.722.097)	2.40
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	27.011.331.790	27.196.753.928	(185.422.138)	0.68

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Semester I Tahun 2022 untuk periode 2022, pendapatan Operasional sebesar Rp0, Beban Operasional Rp2.905.331.579,- (dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(2.905.331.579),- (dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 Juni 2022 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp27.156.365.131,- (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) Surplus/(Defisit)-

LO sebesar Rp(2.905.331.422),- (dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp26.502.643.034,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	PER 30 JUNI 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	157	0,00
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	157	0,00
B. Belanja Negara	B.2			
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3.669.977.000	1.644.100.379	44.44
2. Belanja Barang	B.2.2.	1.276.192.000	597.509.103	46.82
3. Belanja Modal	B.2.3.	10.000.000	10.000.000	100
Jumlah Belanja Negara		4.986.169.000	2.251.609.482	45.16

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NERACA

PER 30 JUNI 2022

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2020
ASET		
Aset Lancar	C.1	
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	39.600.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0
Persediaan	C.1. 3.	0
Jumlah Aset Lancar		39.600.000
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2.819.580.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.212.590.560
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	310.781.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	22.680.401.216
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.051.810.986)
Jumlah Aset Tetap		26.971.731.790
Jumlah Aset		27.011.331.790
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	
Utang kepada pihak ketiga I	C.5. 1.	469.088.756
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	39.600.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		508.688.756
Jumlah Kewajiban		508.688.756
EKUITAS		
Ekuitas	C.6	26.502.643.034
Jumlah Ekuitas Dana		26.502.643.034
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		27.011.331.790

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2022 DAN 2021

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2022	2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.053.843.050	3.501.798.165
Beban Persediaan	D. 3	17.334.250	37.486.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	514.171.016	723.418.112
Beban Pemeliharaan	D. 5	54.718.082	176.776.062
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	30.243.043	41.079.500
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	235.022.138	348.396.111
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.905.331.579	4.828.953.950
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.905.331.579)	(4.828.953.950)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		157	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) LO		(2.905.331.422)	(4.828.953.950)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	27.156.365.131	8.868.690.094	18.287.675.037	206.20
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2.905.331.422)	(4.828.953.950)	1.923.622.528	39.83
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.251.609.325	23.116.628.987	(20.865.019.662)	(90.25)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(653.722.097)	18.287.675.037	(17.633.952.940)	(96.42)
EKUITAS AKHIR	26.502.643.034	27.156.365.131	(653.722.097)	(2.40)

V. *CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016.
- q. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktora Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2022 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan GolI	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0	

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp
2.251.609.482*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.251.609.482,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan anggaran senilai Rp4.986.169.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2022 dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.699.977.000	1.644.100.379	44.44
Belanja Barang	1.276.192.000	597.509.103	46.82
Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100
Total Belanja Bruto	4.986.169.000	2.251.609.482	45.16

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Desember 2022

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp2.251.609.482,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), atau sebesar 45,16% dari anggaran senilai Rp4.986.169.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp1.644.100.379

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2022 Rp1.644.100.379,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari anggaran awal sebesar Rp3.699.977.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp597.509.103* Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2022 sebesar Rp597.509.103,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu seratus tiga rupiah) dari anggaran sebesar Rp1.276.192.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal :
Rp10.000.000* Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari anggaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp39.600.000*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2022 sebesar Rp39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp39.600.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 sebesar Rp39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2022 sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp 0 Persediaan periode 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
26.971.731.790* Nilai Aset Tetap periode 30 Juni 2022 tersaji sebesar Rp26.971.731.790,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp2.819.580.000* Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.819.580.000,-(dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.212.590.560* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 Juni 2022 sebesar Rp2.212.590.560,-(dua milyar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
310.781.000* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2022 sebesar Rp310.781.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 Juni 2022 sebesar Rp0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
22.680.401.216*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 Juni 2022 sebesar Rp22.680.401.216,- (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus satu ribu dua ratus enam belas rupiah)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp(1.051.810.986)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 Juni 2022 sebesar Rp(1.051.810.986),-(satu milyar lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka
Pendek :
Rp508.688.756*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 Juni 2022 sebesar Rp508.688.756,- (lima ratus delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp39.600.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 sebesar Rp39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp
26.502.643.034*

Ekuitas periode 30 Juni 2022 sebesar Rp26.502.643.034,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah) Ekuitas adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0.

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp
1.644.100.379*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 sebesar Rp1.644.100.379,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta seratu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Rp3.501.798.165,-(tiga milyar lima ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
17.334.250*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.334.250,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp37.486.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp514.171.016*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp514.171.016,- (lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh satu ribu enam belas rupiah) dan Rp723.418.112,-(tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua belas rupiah). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp54.718.082*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp54.718.082,- (lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan puluh dua rupiah) dan Rp176.776.062,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh dua rupiah). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp30.243.043*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.243.043,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan Rp41.079.500,- (empat puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
235.022.138*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp235.022.138,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan Rp348.396.111,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain : Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp157*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp157 (seratus lima puluh tujuh rupiah) dan Rp0.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp27.156.365.131,- (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah)

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(2.905.331.422),-(dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan Rp(4.828.953.950),-(empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi

atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp26.502.643.034,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah) dan Rp27.156.365.131,-(dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM

3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi ke-1 tertanggal 11 April 2022;
2. Revisi ke-2 tertanggal 30 Juni 2022;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihil-

LAPORAN PENDUKUNG

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE SEMESTER I TA. 2022**

Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung
Kode Satker dan Nama Satker: (401909) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	V		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual	V		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	V		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi Sakti/Monsakti termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		V	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	V		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ?		V	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		V	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	-	-	-
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU Jajanan Kesehatan di Kementerian Dikti		-	-
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		-	-
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	-	-	-
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)		-	-
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	-	-	-

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	-	-	-
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		-	-
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)		-	-
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		-	-
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			-
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	-	-	-
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI	-	-	-
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-	-	-
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	-	-	-
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	-	-	-
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk			0
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)			
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?	-	-	-
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)			
1. Adakah akun 423xxx	-	-	-
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621	-	-	-
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx	-	-	-
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998	-	-	-

Transfer Keluar :
Transfer Masuk :

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		-	-	-
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL	-	-	-
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		-	-	-
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan	-	-	-
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		-	-	-
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah	-	-	-
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		-	-	-
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?	-	-	-
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	-	-
AKUN BELANJA (5xxxxx)		-	-	-
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?	-	-	-
TELAAH TERKAIT BLU		-	-	-
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	-	-	-
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal ?	-	-	-
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		-	-	-
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU	-	-	-
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)	-	-	-
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)	-	-	-
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		-	-	-
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		V	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		V	Tidak
3. Adakah beban bunga		V	Tidak
4. Adakah beban subsidi		V	Tidak
5. Adakah beban hibah		V	Tidak
6. Adakah beban transfer		V	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		V	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		V	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang		V	Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	V		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		V	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	V		Ya

Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		V	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADI" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		V	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2022, Apakah demikian?	V		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	V		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	V	-	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	-	V	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	V	-	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	V		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		V	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	V		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		V	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		V	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		V	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?		V	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		V	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	V		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	V		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		V	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Juni 2022 ?		V	Tidak
3. Apakah terdapat Jurnal Tidak lazim		V	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	V		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN		V	
MENU DAFTAR BMN			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		V
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		V
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Terdapat Pagu Minus?		V	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		V	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		V	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		V	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2021 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	V		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	V	-	Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	V		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		V	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	V		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		V	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	V		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	V		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

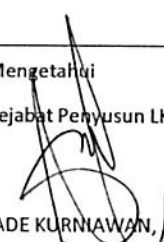
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	V		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	V	-	Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	V		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	V		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	V		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	V		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	V		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkapan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	V		Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	V	-	Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	V		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	V		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	V		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	-	V	
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tidak	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.			
11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	Ada	Tidak	


12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		V
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui
 Pejabat Penyusun LKKL,

 (ADE KURNIAWAN, A.MD)
 NIP. 19890419 202012 1 003

Pangkalan Balai, 22 Juli 2022
 Penelaah,

 (ENOANG EFENDI, S.E., M.M.)
 NIP. 19840913 200904 1 002





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2022



DS:3306-8960-8159-3405

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 4. Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sabesar : Rp. 5.094.169.000 (LIMA MILIAR SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni

2. PNBP

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E K A Y U

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan dalabase RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam dalabase RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jumlah Uang

Rp.	5.094.169.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
	(160) Rp.			
	5.094.169.000			

Terlampir

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022



DS:3306-8860-8159-3405

Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.094.169.000
WA.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.084.169.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	10.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3306-8960-8159-3405

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Program		: 005.01:WA	Program Dukungan Manajemen	Halaman : I A. 1		
Kegiatan	: 1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		5.094.169.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Perolehan Opini WTP		5.084.169.000		
	: 2. 02	Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara				
	: 3. 03	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung				
	: 4. 04	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.00	Layanan	5.084.169.000	
Rincian Output	: 01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	5.000.000
	: 02	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	5.079.169.000
Kegiatan	: 1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		10.000.000		
	: 1. 01	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan				
Klasifikasi Rincian Output 2	: 1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.00	Unit	10.000.000	
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	10.000.000

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP. 196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022
I B. SUMBER DANA**



DS:3306-8960-8159-3405

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

1. Anggaran Tahun 2022		Ket :		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
	Rp.			US\$	Rp.		
1. Rupiah Murni	5.094.169.000	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0		0
2. PNBP	5.094.169.000		(2) RPLN	US\$	0		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	0	b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	0		(2) RHLN	US\$	0		0
5. Hibah Langsung	0	c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		0
6. SBSN PBS	0	d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		0
		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		0
		f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		0

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah							
					1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.699.977	1.384.192	10.000	-	-	5.094.169	-	-	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.699.977	1.384.192	10.000	-	-	5.094.169	-	-	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.699.977	1.384.192	-	-	-	5.084.169	11.09	-	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	3.699.977	1.384.192	-	-	-	5.084.169	160	-	
01 RM		3.699.977	1.384.192	-	-	-	5.084.169	160	-	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	-	10.000	-	-	10.000	11.09	-	
01 RM		-	-	10.000	-	-	10.000	160	-	
	JUMLAH	3.699.977	1.384.192	10.000	-	-	5.094.169	-	-	

Jakarta, 17 November 2021
 Sekretaris Mahkamah Agung RI

Ittd.
 Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
 NIP.196705221993031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3306-8960-8159-3405

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit/Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

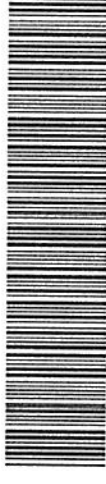
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	315.436	324.268	501.436	665.590	353.501	363.505	667.295	412.456	360.458	364.234	360.458	405.529	5.094.169
		RENCANA PENARIKAN DANA	269.920	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	269.920	269.920	269.987	3.699.977
		BELANJA PEGAWAI	45.516	54.348	231.516	165.235	83.581	83.585	166.940	142.538	90.538	94.314	90.538	135.542	1.384.192
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
		BELANJA MODAL	315.436	324.268	501.436	665.590	353.501	353.505	667.295	412.458	360.458	364.234	360.458	405.529	5.084.169
	005.01.WA.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	269.920	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	500.355	269.920	269.920	269.920	269.920	269.987	3.699.977
		51 BELANJA PEGAWAI	45.516	54.348	231.516	165.235	83.581	83.585	166.940	142.538	90.538	94.314	90.538	135.542	1.384.192
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Ittd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP. 196705221993031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2022
IV A. B L O K I R



DS:3306-8960-8159-3405

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Salter : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttid.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2022
IV B. C A T A N



DS:3306-8960-8159-3405

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 (REVISI KE-4)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,094,169,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			5,094,169,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5,084,169,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		5,084,169,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		5,000,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
A	Penanggulangan Covid-19			5,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,079,169,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu)			32,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	28,425	28,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu)			100,174,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,683,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 (REVISI KE-4)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,094,169,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,259,218,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,379,192,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			<i>464,582,000</i>	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)			361,257,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			75,995,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	75,995,000	75,995,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			27,330,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	911,000	27,330,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>387,300,000</i>	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)			188,670,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	2,670,000	2,670,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 (REVISI KE-4)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,094,169,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.160-Sekayu)			168,000,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	14,000,000	168,000,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.160-Sekayu)			9,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu)			4,000,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			259,090,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			124,800,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	50,000	124,800,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			134,290,000	RM
	- Tambahan BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	25,000,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	<i>Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor</i>			73,240,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)			25,000,000	RM
	- Pakaian Dinas Honorar/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 (REVISI KE-4)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,094,169,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu)			48,240,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBPN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM			136,080,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu)			136,080,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 org x 12 bln]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	
F	PENCEGAHAN COVID			5,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
H	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding			46,100,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,600,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			40,500,000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	205,000	8,200,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
I	Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA			7,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			7,800,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	80,000	800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			10,000,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit		10,000,000	
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.0 Unit		10,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			10,000,000	
A	Pengadaan Alat Pengolah Data			10,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			10,000,000	RM
	- Printer	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 22 Juli 2022



ENDANG EFENDI, S.E., M.M.
 NIP 198409132009041002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
 Tanggal : 22-07-2022
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 :01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI :1100 Kanwil Pengadilan Tinggi Palembang
 SATUAN KERJA :401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS KEWENANGAN :KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	39,600,000
Jumlah ASET LANCAR	39,600,000
ASET TETAP	
Tanah	2,819,580,000
Peralatan dan Mesin	2,212,590,560
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(912,007,688)
<i>Peralatan dan Mesin (Netto)</i>	1,300,582,872
Gedung dan Bangunan	310,781,000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(139,803,298)
<i>Gedung dan Bangunan (Netto)</i>	170,977,702
Aset Tetap Lainnya	190,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22,680,401,216
Jumlah ASET TETAP	26,971,731,790
Jumlah ASET	27,011,331,790
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga I	469,088,756
Uang Muka dari KPPN	39,600,000
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	508,688,756
Jumlah KEWAJIBAN	508,688,756
EKUITAS	
EKUITAS	
Jumlah EKUITAS	26,502,643,034
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27,011,331,790

PANGKALAN BALAI, 30 Juni 2022
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDANG ESENDI, S.E., M.M.
 198409132009041002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSAIE1T
 Tanggal : 22-07-2022
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 Kanwil Pengadilan Tinggi Palembang
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	2,053,843,050
Beban Persediaan	17,334,250
Beban Barang dan Jasa	514,171,016
Beban Pemeliharaan	54,718,082
Beban Perjalanan Dinas	30,243,043
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	235,022,138
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	2,905,331,579
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	(2,905,331,579)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSAIE1T
 Tanggal : 22-07-2022
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 Kanwil Pengadilan Tinggi Palembang
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	157
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	157
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	157
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	(2,905,331,422)
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	0
Beban Luar Biasa	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	(2,905,331,422)

PANGKALAN BALAI , 30 Juni 2022
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDANG AENDI, S.E., M.M.
 198409132009041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 22-07-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON 1 : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH PROVINSI : 1100 Kanwil Pengadilan Tinggi Palembang
SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0	157	157	-
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	0	157	157	-
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	157	157	-
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	157	157	-
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	4,986,169,000	2,251,609,482	(2,734,559,518)	45,16
B.I.1	Rupiah Murni	4,986,169,000	2,251,609,482	(2,734,559,518)	45,16
B.I.1.a	Belanja Pegawai	3,699,977,000	1,644,100,379	(2,055,876,621)	44,44
B.I.1.b	Belanja Barang	1,276,192,000	597,509,103	(678,682,897)	46,82
B.I.1.c	Belanja Modal	10,000,000	10,000,000	0	100,00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	4,986,169,000	2,251,609,482	(2,734,559,518)	45,16
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-



PANGKALAN BALAI , 30 Juni 2022
KUASA PENGESAHAN ANGGARAN

ENDANG BENDI, S.E., M.M.
198409132009041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30-JUN-2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 22-07-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH PROVINSI : 1100 Kanwil Pengadilan Tinggi Palembang
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		30-JUN-2022	30 JUNI 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	27,156,365,131	0	27,156,365,131	-
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(2,905,331,422)	0	(2,905,331,422)	-
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,251,609,325	0	2,251,609,325	-
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(653,722,097)	0	(653,722,097)	-
6	EKUITAS AKHIR	26,502,643,034	0	26,502,643,034	-

PANGKALAN BALAI, 30 Juni 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ENDANG/EFENDI, S.E., M.M.

198409132009041002